

## PERTAMBANGAN EMAS DI PALELEH, 1895 – 1930

### *Gold Mining in Paleleh, 1895 – 1930*

<sup>1</sup>Hasanuddin, <sup>2</sup>Retno Sekarningrum

<sup>1</sup>Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sulawesi Utara, Bumi Beringin Link. V, Kota Manado

Pos-el: anwar\_hasanuddin@yahoo.com

<sup>2</sup>Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Gorontalo, Jalan Anggur, Duingingi, Kota Gorontalo

Pos-el: sekarningrumretno@gmail.com

Naskah diterima 7-09-2021. Naskah direvisi 8-10-2021. Naskah disetujui 10-12-2021

#### **Abstract**

*When huge gold deposits were discovered in Paleleh and its environs in the mid-nineteenth century, the Dutch East Indies government began to pressure Madika Buol to gain a monopoly on gold extraction. The private sector was also granted concession rights to open and operate gold mines in Paleleh as part of the project's development. The active gold mining in Paleleh had an impact on the development of this area. Paleleh's glory days faded as the corporation faced financial difficulties in the early twentieth century. This research aimed to retrace how gold mining in Paleleh progressed or diminished from 1895 to 1930. The following topics were being addressed: how did Paleleh become a gold mining location in the first place; how were the gold mining process and system there, which had an impact on infrastructure development; and how did the Paleleh gold mining firm end up being liquidated. The historical method used includes source collection (heuristics), source criticism, interpretation, and writing (historiography). Analytical descriptions were used to write the research. This research suggested that the growth of gold mining in Paleleh was linked to the Dutch East Indies government's policy in Buol, which tried to dominate gold resources there. Due to the influx of foreign labour, the rise of mining businesses in Paleleh and its environs had impacted infrastructure development, railway line construction, and population growth and diversity. However, mining activity in Paleleh suffered a setback, and several mining businesses were shuttered or liquidated as a result.*

**Keywords:** *gold mines, mining companies, private concessions, infrastructure development, liquidation.*

#### **ABSTRAK**

Saat kandungan emas yang besar ditemukan di Paleleh dan sekitarnya pada pertengahan abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda mulai menekan *Madika* Buol agar dapat memonopoli eksploitasi emas di sana. Pada perkembangannya, pihak swasta juga diberi hak-hak konsesi untuk membuka dan melakukan penambangan emas di Paleleh. Ramainya aktivitas penambangan emas di Paleleh kemudian berdampak pada pembangunan daerah tersebut. Sayangnya, masa kejayaan Paleleh mulai meredup saat memasuki awal abad ke-20 akibat krisis yang dialami perusahaan. Artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi bagaimana pertambangan emas di Paleleh mengalami kemajuan atau kemunduran dalam kurun waktu 1895 hingga 1930. Pertanyaan yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana awal mula Paleleh berkembang menjadi daerah pertambangan emas; bagaimana proses dan sistem penambangan emas di sana yang kemudian berdampak pada pembangunan infrastruktur; dan bagaimana akhirnya perusahaan pertambangan emas di Paleleh dilikuidasi. Metode yang digunakan adalah metode sejarah yang mencakup pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber, interpretasi, dan penulisan (historiografi). Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode deskripsi analitik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan tambang emas di Paleleh berkaitan dengan kebijakan pemerintah Hindia Belanda di Buol yang bertujuan untuk memonopoli sumber daya emas di Paleleh yang diawali pada tahun 1895. Perkembangan perusahaan tambang di Paleleh dan sekitarnya kemudian berdampak pada kemajuan infrastruktur, pembangunan jalur kereta api, dan pertumbuhan jumlah dan

keragaman penduduk karena masuknya tenaga kerja dari luar. Meskipun demikian, kemajuan aktivitas penambangan di Paleleh kemudian mengalami kemunduran hingga banyak perusahaan tambang yang ditutup atau dilikuidasi.

**Kata kunci:** tambang emas, perusahaan pertambangan, konsesi swasta, pembangunan infrastruktur, likuidasi.

## PENDAHULUAN

Pada tahun 1850, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Dinas Pertambangan (*Dienst van het Mijnwezen*) yang berkedudukan di Batavia. Tujuan pendirian lembaga tersebut adalah mengoptimalkan penyelidikan geologi dan pertambangan menjadi lebih terarah. Pada tahun 1870, pemerintah Hindia Belanda mengumumkan berlakunya kebijakan ekonomi liberal dan membuka penanaman modal asing di tanah koloni. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah kolonial kemudian mengeluarkan regulasi pada tahun 1873 yang tujuannya adalah mendorong perusahaan swasta untuk menanamkan modalnya di bidang pertambangan yang sebelumnya dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda (Furnivall, 2009: 343-344).

Sejak emas ditemukan secara luas di Buol, khususnya di Paleleh dan Lintidu pada paruh kedua abad ke-19, mengakibatkan eksplorasi tambang emas di daerah tersebut mengalami peningkatan. Hal ini menarik perhatian pemerintah Hindia Belanda untuk mengatur dan memonopoli hasil tambang emas di daerah tersebut. Akibatnya kekuasaan atas produksi tambang-tambang emas sebelumnya dikuasai sepenuhnya oleh *madika* (raja), kemudian mengalami pergeseran setelah pemerintah Hindia Belanda mengikat *madika* melalui kontrak untuk menyerahkan pajak hasil produksi tambang emas (Hasanuddin & Amin, 2012: 167). Pemerintah Hindia Belanda juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru dan memaksa *Madika* Buol untuk menandatangani kontrak atau perjanjian. Dampak dari ikatan perjanjian tersebut memberi keuntungan

bagi kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah kolonial tidak hanya mendapatkan monopoli perdagangan emas, tetapi juga memperoleh hak politik untuk mengatur pemerintahan Kerajaan Buol hingga akhirnya berhasil membentuk pemerintahan langsung pada 1913. Pada perkembangannya, pemerintah Hindia Belanda juga memberikan hak konsesi kepada perusahaan-perusahaan swasta untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi emas di Paleleh.

Aktivitas penambangan emas di Paleleh juga membawa perkembangan pada daerah tersebut. Paleleh yang awalnya hanyalah wilayah kecil di pantai utara Sulawesi, kemudian mulai bertumbuh karena pembangunan infrastruktur dan masuknya tenaga kerja dari berbagai daerah guna mendukung aktivitas penambangan. Sayangnya, sejak pertama kali dibuka, perusahaan tambang emas di Paleleh mengalami serangkaian perubahan dalam hal keuntungan. Antara tahun-tahun pertama eksploitasi sampai tahun 1930, produksi emas mengalami penurunan sampai akhirnya mengalami likuidasi atau penutupan akibat krisis yang dialami perusahaan.

Sebagai salah satu daerah tambang emas di nusantara Sulawesi yang pernah berjaya pada masanya, Paleleh masih sedikit menuai perhatian dari kalangan sejarawan untuk diteliti. Padahal sejak abad ke-19, Paleleh diketahui kaya akan kandungan emas di wilayahnya. Emas sendiri telah menjadi salah satu komoditas penting yang laris diperdagangkan sejak lama. Oleh karena itu, tulisan ini penting karena dapat memberikan

gambaran tentang bagaimana peran Paleleh dalam menyuplai kebutuhan emas Hindia Belanda dan internasional selama kurun akhir abad 19 hingga awal abad 20. Tulisan ini juga bertujuan untuk merekonstruksi bagaimana kehidupan masyarakat Paleleh telah mengalami kemajuan atau kemunduran melalui proses sejarahnya. Proses sejarah tersebut terjadi melalui interaksi dan jaringan yang dibentuk baik oleh Kerajaan Buol dan hubungannya dengan Pemerintah Hindia Belanda, maupun perusahaan tambang emas dengan para tenaga kerja atau kuli tambang yang kemudian menghasilkan keragaman sistem dan struktur sosial pada masa itu.

Tulisan ini mengambil ruang lingkup daerah Paleleh di Buol pada tahun 1895 hingga 1930. Adapun rumusan pertanyaan yang dibahas dalam tulisan ini adalah (a) bagaimana kondisi geografi dan politik Paleleh pada akhir abad 19 hingga awal abad 20; (b) bagaimana awal mula penambangan emas di Paleleh; (c) bagaimana proses penambangan dan perkembangan perusahaan tambang emas di Paleleh; (d) bagaimana kompensasi hak atas tanah di atur dalam pertambangan emas di Paleleh; (e) bagaimana kegiatan pertambangan emas berdampak pada pembangunan infrastruktur, dan jalur kereta api; (f) bagaimana sistem dan struktur tenaga kerja dalam pertambangan emas di Paleleh; dan (g) bagaimana akhirnya perusahaan pertambangan emas di Paleleh dilikuidasi.

## **METODE**

Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian sejarah yang mengacu pada tahapan-tahapan pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber, interpretasi, dan penulisan (historiografi). Dalam pengumpulan fakta-fakta sejarah (heuristik) dilakukan dengan proses mencari, menemukan, dan menghimpun sumber-sumber sejarah. Oleh karena periode penelitian

ini mencakup masa pemerintahan Hindia Belanda, sumber utama yang digunakan adalah sumber tertulis dan benda. Sumber tulisan yang digunakan berupa sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa peta, foto, laporan pemerintah, buku, surat kabar, dan majalah pada masanya. Adapun sumber sekunder berupa buku-buku hasil kajian tentang Buol didapatkan di Perpustakaan Daerah Kabupaten Buol. Sementara sumber lisan dapat digunakan sebagai tambahan, pembanding, dan gambaran rinci dengan harapan bahwa ingatan yang dilestarikan antargenerasi secara turun-temurun dapat menguak masa lampau yang tidak terekam oleh tulisan.

Selanjutnya, dilakukan kritik sumber terhadap otentitas atau keabsahan sumber (kritik ekstern) dan kritik terhadap kredibilitas atau bisa tidaknya sumber tersebut dipercaya (kritik intern) (Kuntowijoyo, 1995: 100). Kemudian, dilakukan interpretasi dengan merangkai, menghubungkan, dan menerangkan fakta-fakta yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji sehingga dapat menjadi sebuah historiografi (Kartodirdjo, 1982: 18-19).

Penulisan artikel ini menggunakan metode deskripsi analitis dengan membedakan atau menguraikan suatu peristiwa ke dalam bagian-bagian tertentu untuk memahami daerah Paleleh sebagai daerah tambang emas di Buol. Hal ini dapat memberikan sebuah pengertian tentang kesejarahan sebagai suatu proses sehingga dapat digambarkan kembali (Abdullah, 1985: 5).

## **PEMBAHASAN**

### **Kondisi Geografi dan Politik Paleleh Akhir Abad 19 hingga Awal Abad 20**

Secara geografis, Paleleh terletak di wilayah Teluk Paleleh yang dilindungi oleh beberapa pulau. Salah satunya adalah Pulau Jellesma (nama tersebut diambil sebagai

bentuk penghormatan kepada Residen Menado, E.J. Jellesma). Wilayah Paleleh merupakan daerah pantai di bagian utara dan daerah pegunungan di bagian selatan. Dalam artikel *Verberg* tahun 1889, dinyatakan bahwa wilayah penambangan emas terletak di pegunungan yang tinggi, yakni Gunung Dopalak. Di wilayah tersebut dibangun beberapa rumah tinggal bagi pegawai tambang dan kamp semi permanen bagi para buruh atau kuli tambang. Wilayah Paleleh tidak memiliki dataran yang luas tetapi memiliki beberapa tanjung. Di daerah dataran terdapat dua puluh rumah dan sebuah gudang di sepanjang pantai yang dikembangkan menjadi pusat permukiman penduduk. Lokasi pelabuhan di Paleleh sangat strategis karena di depannya terdapat Pulau Jellesma sebagai penahan ombak. Dari pelabuhan ini pula, produk-produk emas kemudian dikirim atau diekspor ke luar Paleleh (*Soerabaijisch Handelsblad*, 1897: 1).

Pada masa kolonial Hindia Belanda, Paleleh adalah salah satu wilayah di bawah kekuasaan Kerajaan Buol yang mengalami eksploitasi besar-besaran oleh pihak perusahaan pertambangan, baik milik pemerintah kolonial Hindia Belanda maupun pihak swasta. Masuknya perusahaan-perusahaan pertambangan mengakibatkan mengalirnya investasi dalam jumlah besar ke Paleleh dan munculnya mata pencaharian tenaga kerja sebagai kuli untuk mendukung eksploitasi pertambangan. Faktor inilah yang menyebabkan Paleleh berkembang pesat dan menjadi wilayah penting di Kerajaan Buol,

Kerjasama antara Kerajaan Buol dengan pemerintah Hindia Belanda terkait penambangan emas sendiri telah berlangsung sejak pertengahan abad ke-19. Pada masa itu, terjadi kesepakatan kontrak atau perjanjian pada 12 Nopember 1857 antara *Madika* Buol dengan Gubernur Maluku (ANRI, *Ambon*: No. 1532.). Selain itu, Kerajaan Buol juga aktif berhubungan dengan kerajaan di

sekitarnya. Pada tahun 1831 penambangan emas mulai dilakukan di Sumalata (Limboto) dan sebagian besar pekerja tambang kuli atau buruh merupakan dari orang Gorontalo dan orang Buol (ANRI, *Inventaris Arsip Gorontalo 1810-1865*: No. 1/6.).

Hubungan pemerintah Hindia Belanda dengan kerajaan Buol, utamanya Paleleh, sempat mengalami ketegangan akibat peristiwa pemberontakan oleh Syarif Mansur di Menado. Pada 26 Agustus 1875, orang-orang Buol yang dipimpin oleh Syarif Mansur melakukan penyerangan di Kota Menado. Kelompok penyerang terdiri atas 48 orang berasal dari Paleleh. Serangan itu mengalami kegagalan dan semua pelaku penyerangan dibunuh atau dihukum mati oleh pejabat pemerintah Hindia Belanda. Setelah melalui penyelidikan, ternyata *Madika* Buol tidak terlibat dalam penyerangan tersebut. Bahkan keadaan di Buol sempat mengalami kekacauan karena pemerintahan kerajaan kurang dipatuhi oleh rakyat. Selain itu, di Kantanan – antara Buol dan Paleleh – telah muncul kerajaan baru dengan mengangkat seorang *madika* (Lapian, 2011: 259).

Campur tangan pemerintah kolonial Hindia Belanda di wilayah swapraja pribumi di daratan Sulawesi menjadi semakin aktif sejak akhir tahun 1893. Pada tahun 1896, Residen Menado mengangkat Dr. H. Siber sebagai *gezaghebber* (perwakilan pemerintahan Hindia Belanda) di Buol yang berkedudukan di Paleleh (Samad, 2000: 68-70). Paleleh pun menjadi pusat administratif pemerintahan Hindia Belanda yang pertama kali didirikan di Buol.

Pada perkembangannya, administrasi Buol mengalami perubahan ketika pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan untuk melakukan reorganisasi pemerintahan Gorontalo. Namun, tetap dalam bentuk *afdeeling*. Di bawah *afdeeling*, Gorontalo memiliki empat *onderafdeeling*, yaitu *onderafdeeling* Gorontalo, Boalemo, Kwandang,

dan Buol. *Onderafdeeling* Buol di bawah kekuasaan seorang *gezaghebber* yang bernama Van Huizen yang berkedudukan di Paleleh (Juwono & Hutagalung, 2005: 345-346).

Pada tahun 1903 kembali terjadi reorganisasi pemerintahan di seluruh Hindia Belanda akibat kebijakan desentralisasi. Pada saat itu, ditetapkan bahwa *onderafdeeling* Buol diperintah oleh seorang kontrolir dan dibantu oleh tiga orang kepala distrik (*marsaoleh* atau setingkat camat) untuk Distrik Paleleh, Distrik Biau, dan Distrik Bunobogu. Daerah Distrik Paleleh meliputi sepuluh kampung dengan jumlah penduduk 2.800 jiwa, Distrik Biau meliputi empat belas kampung dengan jumlah penduduk 5.300 jiwa, dan Distrik Bunobogu meliputi empat belas kampung dengan jumlah penduduk 6.100 jiwa (Paulus, 1917: 425-426).

### Awal Mula Penambangan Emas di Paleleh

Pada awal tahun 1890, dua ahli geologi Belanda, yaitu P. Juginger dan Goeseling mendapat tugas untuk melakukan penelitian di Buol. Hasil penelitiannya merupakan kontributor terpenting untuk pembukaan tambang-tambang emas di Paleleh dan Lintidu dan membuktikan bahwa daerah Buol kaya akan kandungan emas dan logam. Hasil penelitiannya tersebut kemudian dilaporkan kepada direktornya, L. P. Dekker di Priangan. Setelah memahami potensi kandungan emas di Buol, Dekker memutuskan untuk menawarkan izin kepada pemerintah Hindia Belanda untuk melakukan perjanjian dengan penguasa Buol guna menjelajahi tanahnya. Marinus Cornelis Emanuel Stakman (Residen Menado) memberikan rekomendasi dan Batavia mempertimbangkan proposal Dekker pada bulan Desember 1890. Berita proposal Dekker pun menyebar di kalangan investor dan pengusaha pertambangan di Batavia. Pada Agustus 1891, Firma Landberg di Batavia mengusulkan rekomendasi

kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan konsesi setiap eksplorasi penambangan di Buol. Masalahnya adalah daerah Buol masih di bawah kekuasaan kerajaan Buol. Penemuan kandungan emas di daerah tersebut kemudian memotivasi pemerintah Hindia Belanda untuk mengikat Madika Buol melalui kontrak atau perjanjian untuk eksplorasi lebih lanjut terkait kandungan mineral di Buol (Nadjamuddin, 2015: 351-352).

Pada 11 Maret 1891, Firma Landberg akhirnya berhasil menandatangani kontrak dengan *madika* dan para bangsawan Buol di utara Sulawesi (memegang hak sebagai swapraja) tentang kegiatan penambangan emas. Pemerintah Hindia Belanda dalam keputusannya tanggal 29 Juni Nomor 19 kemudian menegaskan bahwa Firma Landberg yang berkedudukan di Batavia telah disetujui izinnya untuk membuka tambang di wilayah Buol. Berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham dinyatakan bahwa perusahaan itu melepaskan semua tuntutan yang muncul baginya dari kontrak yang dibuat oleh Firma Lanberg tanggal 11 Maret 1891 dengan *madika* dan para bangsawan Buol, dan disetujui melalui keputusan Residen Menado Nomor 506 tanggal 14 Desember 1892. Isi kontrak antara lain bahwa pemerintah Hindia Belanda dibayarkan cukai tetap tahunan 25% per bahu seluas 3.000 bahu, menjadi f 7.500 dan 10% hasil netto (*De Java Bode*, 1897: 1).

Pada perkembangannya, Firma Landberg juga mendirikan cabang perusahaan *Nederlandsen-Indische Mijnbouw Maatschappij*. Berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda tertanggal 9 Oktober 1892, konsesi diberikan kepada perusahaan tersebut untuk penelitian dan eksploitasi tambang emas di Buol, serta keleluasaan untuk menentukan lokasi di manapun sebagai area konsesi selama lima tahun (Nadjamuddin, 2015: 352). Pada pertengahan tahun 1898, dewan perusahaan *Nederlandsen-Indische Mijnbouw*

*Maatschappij* melaporkan hasil yang baik dari kegiatan penambangan di Paleleh. Bangunan-bangunan yang didirikan di sana berjalan dengan baik. Demikian pula pekerjaan untuk halte kereta, melalui rute hutan tropis yang awalnya mengalami kesulitan, tetapi akhirnya dapat diatasi. Selama beberapa bulan telah disiapkan mesin kereta gantung untuk mengangkut bijih emas. Sebuah dermaga di Teluk Tang juga dibangun guna mengatasi masalah bongkar muat kapal. Selagi itu, dibuat pula jalan dengan rel *Decauville*, sehingga barang-barang dapat diangkat dengan mesin (*Bataviaasch Nieuwsblad*, 1898: 1).

Dewan perusahaan juga melaporakan bahwa bagian koridor 2 yang berada di ketinggian 521 meter di atas permukaan laut telah menghasilkan bijih mineral dengan kandungan  $\frac{1}{2}$  hingga  $1\frac{1}{2}$  ons emas per ton. Jika bijih tersebut diproses perusahaan, maka dapat menghasilkan keuntungan besar. Namun, untuk ekspor bijih ke Eropa hanya dapat menghasilkan sedikit keuntungan karena biaya pengiriman yang mahal. Banyaknya bijih-bijih dikumpulkan di koridor 2 menyebabkan sebagian bijih dipindahkan ke arah utara di koridor Dopalak, dan terakhir telah dibuat koridor pada ketinggian 535 meter di atas permukaan laut. Koridor Dopalak sendiri menghasilkan bijih yang baik dengan ketebalan 30 sampai 60 sentimeter yang dapat mengandung 5 sampai 6 ons emas per ton. Penambangan kemudian diperluas dengan membuka dua terowongan baru. Salah satunya adalah terowongan yang dikenal dengan nama Patokko yang sebelumnya telah dikerjakan oleh penduduk lokal (*Bataviaasch Nieuwsblad*, 1898: 1).

### Proses Penambangan dan Perkembangan Perusahaan Tambang di Paleleh

Sehubungan keberadaan sebagian besar bahan tambang terletak di dalam perut bumi sehingga dibutuhkan proses penambangan

di bawah tanah untuk memperoleh hasil tambang tersebut. Pertambangan emas mendapatkan perhatian yang terus meningkat dari para pelaku bisnis di sektor pertambangan dikarenakan keberadaan emas itu sendiri sebagai komoditas dengan harga yang relatif stabil dan juga laku dipasaran internasional. Di daerah Paleleh dan Lintidu, penambangan dilakukan oleh perusahaan dengan cara tambang dalam. Salah satu syarat penggunaan teknik ini adalah karakteristik endapan logamnya harus berupa urat (*vein*). Urat-urat emas tersebut dicari dengan cara membuat terowongan dan lubang sumuran tegak (*vertical shaft*). Bentuk terowongan dapat berukuran 1,0 x 1,5 m sampai 1,5 x 2,0 m dengan kedalaman 40-60 meter. Kemudian dibuat lubang bukaan baik vertikal maupun horizontal untuk mengikuti arah urat bijih emasnya, sampai menemukan salah satu urat bijih emas dengan ukuran yang sesuai dengan keperluan.

*Gambar 1. Salah satu bangunan terowongan.*



*Struktur pintu masuk ukurannya relatif kecil dan ketika memasuki bagian dalam ukurannya cukup luas. Jarak lokasi terowongan sekitar 1 km dari Kantor Desa Lintidu. (Sumber: Penulis, 2020)*



Gambar 2. Salah satu bangunan terowongan. Struktur pintu masuk ukurannya relatif kecil dan ketika memasuki bagian dalam ukurannya cukup luas. Jarak lokasi terowongan sekitar 1 km dari Kantor Desa Lintidu. (Sumber: Penulis, 2020)

Selain itu, terdapat lubang sumuran tegak (*vertical shaft*) yang dibuat berbentuk persegi empat dengan ukuran 1,25 x 1,25 m sampai 1,5 x 1,5 m dengan kedalaman antara 30 – 40 meter. Lubang sumuran tersebut terus digali sampai mencapai urat bijih emas. Jalur-jalur dalam tanah berupa terowongan dan sumuran seperti di atas dapat ditemukan di pegunungan Lintidu.



Gambar 3. Salah satu bangunan lubang sumuran tegak (*vertical shaft*). (Sumber: Penulis, 2020)

Insinyur Bower dari *Nederlandsch-Indische Mijnbouw Maatschappij* pernah

memperkuat dinding poros utama terowongan dari dua bagian menjadi tiga bagian. Pengembangan poros baru bertujuan untuk mencapai kedalaman yang lebih cepat, sehingga dapat lebih cepat pula dalam mengekstraksi bijih emas. Pengumpulan bijih untuk pengiriman melalui pemrosesan lokal sendiri terus berlanjut secara teratur. Menurut laporan tanggal 12 Juli 1899, sebanyak 50 ton bijih emas akan dikirim oleh kapal Paleh pada 18 Juli 1899 (*De Locomotief: Samarangsche handels- en advertentie-blad*, 1899: 3).

Kegiatan penambangan emas sendiri memerlukan modal yang besar untuk membiayai operasional tambang dan upah para tenaga ahli serta buruh atau kuli tambang. Gambaran tentang anggaran berupa upah untuk para pekerja perusahaan penambangan dapat dilihat dari anggaran operasional penambangan perusahaan *Nederlandsch-Indische Mijnbouw Maatschappij* dengan rencana penambangan selama setahun atau dua belas bulan. Berikut tabelnya.

**Tabel 1. Modal Operasional Tambang *Nederlandsch-Indische Mijnbouw Maatschappij***

70 kuli f 15/bln	f 12.600
2 pengawas f 75/bln	f 1.800
2 penempa logam f 40/bln	f 960
2 penunjuk jalan f 25/bln	f 600
1 insinyur tambang	f 12.000
1 direktur tambang	f 6.000
<b>Lain-lain</b>	
Saldo kerugian untuk tahun kerja pertama	f 5.000
Peralatan	f 2.600
Mesin pompa dan kipas udara	f 2.000
Bahan peledak	f 2.000
Biaya perjalanan dan biaya tak terduga	f 4.440
<b>Jumlah/total</b>	<b>f 50,000</b>

(Sumber: *Soerabaijasch handelsblad*, 1894).

Pada perkembangannya, beberapa perusahaan tambang emas dengan dukungan modal dan tenaga ahli yang lebih besar mulai bertumbuhan. Tahun 1896 perusahaan *Goud Syndicaat Bwool* berdiri di Batavia dengan lokasi izin penambangan berada di Kwala Besar (Witkamp, 1898: 23). Pada tahun 1907, manajemen perusahaan ini dijabat oleh Mr □. Maclaine Pont sebagai direktur, didampingi dua komisaris, yaitu H.F den Dekker dan □. SL. Kalenkongan (*Regering Almanak Voor Nederlandsch-Indie*, 1907: 486).

Selain itu, ada pula perusahaan *Mijnbouw-Maatschappij Bwool*<sup>1</sup> yang berdiri pada tahun 1897 di Amsterdam. Perusahaan ini menanamkan modal investasi sebesar f 4.700.000 dengan pinjaman obligasi f 300.000. Dalam manajemen perusahaan, direktur dijabat oleh Dr. H. Siber dan John C van Lennep. Adapun anggota komisaris, yaitu Jhr. W.A. Baud, G.A. Croockewit, Jhr. H.M. Huvdecoper, J.H. Landberg, dan E. Luden. Sementara itu, bagian tenaga ahlinya dijabat oleh T.W. Atherton. Dalam melaksanakan usahanya, *Mijnbouw-Maatschappij Bwool* memiliki izin usaha sebanyak ± 125 blok tambang dengan 4.000 saham biasa dan 1.400 saham utama sebesar f 500 (Witkamp, 1898: 23).

Pada bulan Juni 1897, *Mijnbouw Maatschappij Bwool* di Lintidu-Paleleh mulai beroperasi. Perusahaan ini menggunakan sistem tertutup yang dilakukan secara sederhana (*strip pit mining*) dalam proses penambangannya. Lubang-lubang rel dibangun dan daerah galian dibentuk berdasarkan urat bumi atau garis batu emas secara berlapis hingga enam susun. Selain untuk keperluan memudahkan rel, hal itu juga digunakan untuk mengalirkan air bawah tanah ke permukaan. Dari proses tersebut *Mijnbouw Maatschappij Bwool* berhasil mengolah dan mengemas emas dalam bentuk kepingan secara langsung (Wawancara Hasyim Pakude, 30 Maret 2020).

<sup>1</sup> Berdiri di bawah kendali perusahaan Firma P Landberg en Zoon di Batavia.



Gambar 4. *Mijnbouw-Maatschappij Bwool* di Lintidu, 1910. (Sumber: KITLV-001033557)

Menurut Siber, direktur *Mijnbouw Maatschappij Bwool*, pekerjaan paling sulit yang harus dihadapi para pekerja dalam kegiatan penambangan adalah ketika memasuki musim hujan. Pekerjaan tambang di Lintidu dan Paleleh sangat diperlambat oleh hujan lebat, sehingga menghentikan semua pengangkutan bijih mineral. Kasus terhambatnya proses pertambangan akibat musim hujan pernah diberitakan di dalam surat kabar *De locomotief*. Kala itu, dikabarkan bahwa kapal pengangkut barang telah tiga kali mengalami kegagalan untuk memuat bijih di Paleleh (*De Locomotief: Samarangsch Handels- En Advertentie-Blad*, 1896: 2).

Perusahaan tambang selanjutnya yang berdiri adalah *Mijnbouw Maatschappij Paleleh*. Perusahaan ini secara resmi berdiri di Batavia pada 1 Nopember 1905 berdasarkan surat keputusan Nomor 7 tanggal 20 September 1905. Pendirian perusahaan dibuat oleh Notaris E.H. Carpentier Alting dengan modal saham f 5.000.000<sup>2</sup>, dimana f 2.900.000 merupakan saham preferen dan f 2.100.000 merupakan saham biasa (*Algemeen Handelsblad*, 1905: 2). Adapun susunan manajemen perusahaan, yaitu J Dinger sebagai direktur; P Landberg, Mr. A. Maclaine Pont, JJWH van der Toorn, dan Mr. Ed H Winkelman sebagai komisaris

<sup>2</sup> Jumlah yang harus dibayarkan pada tahun 1905 adalah senilai f 4.100.000.

(*Regering Almanak Voor Nederlandsch-Indie*, 1907; 497: *Koloniaal Verslag Tahun 1906*).



Gambar 5. Iklan penjualan saham *Mijnbouw Maatschappij Paleleh*.  
(Sumber: *Het nieuws van den dag: kleine courant*, 1905)

### Kompensasi Hak atas Tanah, Pembangunan Infrastruktur dan Jalur Kereta Api

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ketika ditemukan cadangan emas yang kaya di Lintidu dan Paleleh, sejumlah investor swasta kemudian mengajukan permohonan kepada Menteri Koloni untuk mendapatkan konsesi. Pada mulanya, pemerintah Hindia Belanda membuat perjanjian dengan *Madika Buol* untuk menyewa tanah guna dijadikan lahan pertambangan dan dari hasilnya nanti pengusaha pertambangan membayar sewa atas tanah tersebut. Hal tersebut termaktub dalam kontrak atau perjanjian antara Eeltje Jelles Jellesma (Residen Menado) dan *Madika Patra Turungku* (Raja Buol) pada 27 Agustus 1895. Adapun isi kontrak antara lain tentang kesediaan *Madika Buol* menyiapkan lahan-

lahan untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral emas di Buol (Wawancara Ibrahim Turungku, 1 Maret 2014).

Pada 29 Juni 1897, *Mijnbouw-Maatschappij Bwool* memperoleh Surat Konsesi dengan kesepakatan kontrak selama 75 tahun. Surat kesepakatan kontrak tersebut disahkan oleh Dr. H. Siber (*gezaghebber*) dengan Patra Turungku (*Madika Buol*), dua orang sebagai President Radja, yaitu Datu Alam Turungku dan Mangkona, dan Husain Korompot (Jogugu Buol). Adapun wilayah eksplorasi tambang emas perusahaan tersebut mulai dari daerah Tolau hingga daerah Tabamuang.

Oleh karena telah disepakati perjanjian antara Eeltje Jelles Jellesma (Residen Menado) dengan *Madika Patra Turungku* (Raja Buol), perusahaan pertambangan dibuka dengan cara menyewa tanah kerajaan atau tanah penduduk. Perusahaan *Mijnbouw-Maatschappij Bwool* sendiri telah membayar seluruh sewa tanah milik Harassi sebesar f100 perbulan, terhitung sejak perusahaan tambang itu mulai melakukan operasionalnya. Namun, pada saat bersamaan sebagian besar penduduk yang menetap di daerah perbukitan menolak keberadaan perusahaan-perusahaan tambang Belanda. Pihak pemerintah Hindia Belanda kemudian menekan *Madika Buol* untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan campur tangan dan desakan pihak kerajaan, akhirnya penduduk merelakan tanahnya untuk kegiatan penambangan. Sayangnya, karena isi kontrak menyatakan bahwa ganti rugi hanya diberikan kepada Harassi, sebagian besar penduduk lainnya tidak mendapatkan kompensasi atas tanah mereka. Selama melakukan proses penambangan, pihak *Mijnbouw-Maatschappij Bwool* hanya membayarkan uang ganti rugi sebanyak f 100 pertahun. Selain Harassi, pembayaran ganti rugi juga diberikan kepada dua orang lainnya yang dianggap mempunyai jasa dalam mendukung usaha *Mijnbouw-Maatschappij*

*Bwool* di Paleleh-Lintidu (Kawandaud, 1949: 60) (Wawancara Hasyim Pakude, 30 Maret 2020).<sup>3</sup>

Pada 4 April 1900 di Paleleh, pemerintah Hindia Belanda membuat kontrak baru tentang kompensasi hak atas tanah dengan Harassi (pemilik tanah) yang memuat lima pasal yang isinya: (1) Harassi menyetujui perjanjian atas hak di atas tanahnya yang mengandung emas di Lintidu seperti halnya dinyatakan dalam surat konsensi dari *Mijnbouw Maatschappij Buol* tanggal 29 Juni 1897 No. 19 pada perusahaan yang kontraknya selama 75 tahun; (2) *Nederlandsch-Indische Mijnbouw Maatschappij* mengakui mengganti kerugian untuk Harassi dengan pembayaran *f* 100 per bulan. Pembayaran tersebut dibayarkan setelah pertambangan emas mulai beroperasi di Djandja. Demikian pula halnya, terjadi bagi pertambangan emas di Dopalak. Apabila kandungan emas berkurang, maka pembayarannya juga akan berkurang; (3) Jika Harassi meninggal dunia, para ahli warisnya harus menerima pembayaran seperti halnya yang telah diterima Harassi; (4) Apabila timbul perselisihan dari isi perjanjian dan tidak dicapai kesepakatan damai, hubungan perjanjian diputus. Terkait hal tersebut dipilihlah tiga orang komisaris yang anggotanya terdiri atas *Nederlandsch Indische Mijnbouw Maatschappij* atau penggantinya, Paduka kerajaan Buol, dan Residen Menado; (5) Perjanjian ini dimulai dari sebagaimana kedua belah pihak sudah bertanda tangan tersebut di bawah ini dengan sepengetahuan dari Residen Menado dan Paduka Madika Buol, dan Dr. H. Siberber bertanda tangan sebagai saksi (Wawancara Hasyim Pakude, 29-30 Maret 2020).

Sejak didirikan perwakilan pemerintah kolonial Belanda di Paleleh dengan menempatkan seorang *gezaghebber* yang

bertanggung jawab langsung kepada Residen Menado pada tahun 1896, proses pembangunan infrastruktur di Paleleh dan Lintidu mulai dilakukan. Tujuannya adalah untuk mendukung aktivitas politik pemerintah kolonial Belanda dan perusahaan pertambangan. Adapun sarana prasarana yang dibangun kala itu seperti kantor dan rumah *gezaghebber*, kantor polisi, rumah sakit, kompleks perumahan, gereja, pasar, listrik, kantor perusahaan tambang, rumah insinyur tambang, barak-barak untuk para buruh atau kuli, dan bioskop yang berfungsi melayani kebutuhan para pekerja tambang. Pembangunan infrastruktur di Paleleh dan Lintidu sendiri telah merubah wajah wilayah tersebut dari sebuah kampung kecil terpencil di tengah hutan menjadi sebuah daerah pertambangan dan pusat pemerintahan kolonial Belanda di Buol.

Pada awal tahun 1898, pemerintah Hindia Belanda merencanakan sebuah proyek pembangunan jalan kereta api yang menghubungkan Buol dengan Menado dan daerah-daerah di sekitarnya. Pada 17 Februari 1898, P. Ezchaisier dari Mojokerto mengajukan permohonan bagi prioritas untuk izin pembukaan dan eksploitasi jalur kereta api di Karesidenan Menado yang membentang dari Gorontalo ke Limboto melalui Kwandang, dengan cabang dari Limboto ke Paguat dan menuju Sumalata lalu ke Buol. Namun, rencana proyek tersebut mengalami kegagalan setelah permohonan A.D. van Assenhelft de Koningh mengalami penolakan untuk prioritas selama tiga tahun terkait rencana pembukaan jalan trem dan kereta api yang membentang dari Menado lewat Tondano, Amurang, Kwandang, Paleleh, dan Buol ke Tolitoli dengan cabang dari Amurang atau Kwandang ke Gorontalo. Penolakan juga terjadi pada permohonan T.J.M. Reynders bagi prioritas selama dua tahun untuk konsesi pembukaan dan eksploitasi sebuah jalan kereta api sekunder di utara Sulawesi yang membentang dari Buol sepanjang pantai utara

<sup>3</sup> Namun, kontrak perusahaan *Mijnbouw-Maatschappij Bwool* tidak mencapai 75 tahun dan hanya berlangsung selama 30 tahun.

melalui Paleleh, Kwandang, dan Amurang ke Menado (*De Locomotief*, 1898: 2).

Pada 28 Maret 1898, W. van Veldhoven, pengusaha kelahiran Belanda Selatan yang menetap di Manado mengajukan surat permohonan kepada Residen Menado untuk pembangunan jalur kereta api selama lima tahun, dan jaringan telepon atau telegram di wilayah Karesidenan Menado. Kemudian, surat permohonan diperbarui pada 2 April 1898 yang isinya mengusulkan perubahan lama proses pembangunan jalur kereta api dari lima tahun menjadi satu tahun. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, C.H.A van der Wijk lewat *Besluit* (Surat Keputusan) Nomor 26 tanggal 22 Juli 1898 (*Besluit* Nomor 26 Tahun 1898, n.d.).

Pertengahan tahun 1899, perusahaan *Nederlandsch-Indische Mijnbouw Maatschappij* dengan dipimpin oleh Insinyur Bower melakukan berbagai pembangunan jalan dan bangunan di Dopalak. Pembangunan tersebut diharapkan selesai pada minggu pertama bulan Juli. Di daerah Dopalak sendiri telah dibangun rumah pengawas, gudang dinamit, dan satu blok rumah untuk para kuli dari Gorontalo. Selanjutnya, ditambahkan tiga rumah pengawas, satu blok rumah untuk seratus kuli tambang dan jalan trem. Gudang untuk penyortiran dan pengeringan bijih emas juga diperbesar. Selain itu, dibangun pula gudang untuk tempat penyimpanan persediaan penambangan. Di atas bukit, mesin operator terhubung dari tambang ke stasiun 1. Susunan mesin untuk poros utama juga telah selesai dikerjakan. Di bagian lain, jalan-jalan dibuka untuk perhubungan darat: dari Paleleh ke Dopalak, dari Dopalak ke Bolano, dan dari Bolano ke Lintidu. Sedangkan jalan dari Lintidu ke Paleleh melalui Boentoe telah selesai setengah jalan. Selain pembuatan jalan, didirikan pula tiang telepon. Insinyur Bower mengatakan bahwa pekerjaan pembangunan infrastruktur pada bulan Juni mengalami banyak hambatan karena faktor hujan

lebat. Selain di Dopalak, pada akhir bulan Juli pengerjaan bangunan bengkel, gudang pembangkit listrik, gudang mesin, dan tempat penyimpanan air di Lintidu juga berhasil diselesaikan (*De Locomotief: Samarangsch handels- en advertentie-blad*, 1899: 3).

### Pegawai dan Kuli Tambang

Perusahaan pertambangan membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak, baik tenaga ahli tambang seperti insinyur dan direktur, maupun tenaga kasar seperti kuli atau buruh tambang. Seorang insinyur tambang bertugas menjalankan perusahaan tambang dan bertanggung jawab atas pengangkutan serta pemasaran. Sementara itu, direktur tambang bertanggung jawab pada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan proses produksi. Di bawah insinyur dan direktur, ada pula pengawas, penempa logam, dan penunjuk jalan. Penunjuk jalan bertugas mengarahkan para kuli tambang ke lokasi penambangan, sekaligus sebagai pengawas, dan menentukan layak tidaknya operasional penambangan di terowongan. Pada umumnya, perusahaan merekrut penduduk lokal sebagai penunjuk jalan. Salah satu warga lokal yang terkenal sebagai penunjuk jalan penambangan adalah Katili Piinaoe atau dikenal Ahili (orang Gorontalo) (Wawancara Ramli Abd. Hamid, 30 Maret 2020) (Wawancara Hasyim Pakude, 30 Maret 2020).

Dalam struktur organisasi *Mijnbouw-Maatschappij Bwool* setidaknya terdapat seorang insinyur ahli tambang dengan gaji *f* 1.000 per bulan, seorang direktur dengan gaji *f* 500 per bulan, dua orang pengawas dengan upah *f* 75 per bulan, dua orang penempa logam dengan upah *f* 40 per bulan, dan dua orang penunjuk jalan dengan upah *f* 25 per bulan (*Soerabaijasch Handelsblad*, 1894). Pada umumnya, posisi-posisi tingkat atas bagi pekerja di *Mijnbouw-Maatschappij Bwool* merupakan bangsa Eropa yang didatangkan

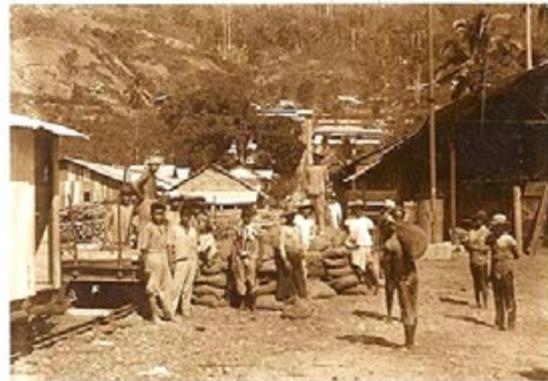
ke Paleleh untuk menjalankan perusahaan tambang. Beberapa di antaranya meninggal di tambang, sehingga tidak mengherankan jika di sekitar bekas daerah pertambangan di Linditu ditemukan beberapa makam orang Eropa.



Gambar 6. Salah satu nisan makam orang Eropa di daerah perusahaan tambang. (Sumber: Penulis, 2020)

Sementara itu, para kuli atau buruh tambang merupakan pekerja utama dan tulang punggung dalam proses produksi di lubang atau terowongan tambang. Para kuli pada umumnya laki-laki muda yang kuat secara fisik dan awalnya tidak membawa serta keluarga di tempat kerjanya. Secara sosial-budaya, kuli di perusahaan tambang dapat dibagi lagi ke dalam subkelompok, subbudaya, dan kelompok-kelompok etnik lainnya. Sementara itu, jika merunut pembagian pekerjaan menurut manajemen perusahaan, kuli terdiri atas kuli kontrak dan kuli bebas. Perusahaan *Mijnbouw-Maatschappij Bwool* mempekerjakan sekitar tujuh puluh kuli yang terdiri atas orang Jawa (khususnya dari Jawa Timur dan Jawa Tengah), Gorontalo, Manado atau Minahasa, dan etnik lainnya. Asal kuli dari berbagai daerah tersebut menyumbangkan keragaman (pluralisme) komposisi penduduk di daerah Paleleh. Adapun upah yang diberikan rata-rata sebesar *f*15 per bulan (*Soerabaijasch Handelsblad*, 1894). Selain itu, pihak perusahaan tambang juga menyediakan sarana

hiburan bagi para kuli dengan pemutaran film tanpa suara (film wowok) (Wawancara Ramli Abd. Hamid dan Hasyim Pakude, 29 Maret 2020).



Gambar 7. Para kuli kontrak dan kuli bebas *Mijnbouw-Maatschappij Bwool* di Linditu, 1910. (Sumber: KITLV-001033660)

Hubungan perusahaan pertambangan dengan para pekerja atau kuli tambang diatur dalam *Koeli Ordonantie* (peraturan kuli). *Koeli Ordonantie* dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda pada 13 Juli 1880 di Buitenzorg (Bogor) dan secara resmi berlaku pada 28 Oktober 1880. Pada mulanya, *Koeli Ordonantie* hanya diberlakukan untuk wilayah Sumatera Timur yang isinya memuat peraturan tentang hak dan kewajiban perusahaan dan pekerja yang berasal dari tempat lain di wilayah Sumatra Timur serta sanksi bagi yang melanggar. Pidana yang tercantum dalam ordonansi ini sering dikenal dengan *poenale sanctie* (sanksi pidana). Dalam perkembangannya, *Koeli Ordonantie* kemudian mulai berlaku untuk seluruh wilayah Hindia Belanda pada tahun 1889 (Stibbe, 1919: 362).

Sementara itu, perihal kesehatan para kuli di daerah tambang merupakan masalah tersendiri. Para kuli yang berasal dari luar Sulawesi dan belum terbiasa dengan perubahan iklim di Paleleh seringkali terserang penyakit, seperti demam. Selain karena kondisi iklim, para kuli juga menderita penyakit karena mereka harus bekerja

membuka hutan. Akibatnya banyak yang tidak mampu bekerja. Perusahaan kemudian mulai mendirikan rumah sakit dan mendatangkan dokter untuk mengurus kesehatan para kuli tambang tersebut (*Bataviaasch Nieuwsblad*, 1898: 9-10). Selama pertengahan tahun 1898, kesehatan para kuli dan kuli kontrak tambang pun mengalami peningkatan pesat berkat penyediaan fasilitas kesehatan oleh perusahaan (*Bataviaasch Nieuwsblad*, 1898: 1).

Namun, kondisi tersebut kembali mengalami perubahan pada akhir tahun 1898. Pada saat itu terjadi penurunan jumlah kuli tambang. Faktor ini disebabkan oleh kesulitan yang dialami para kuli tambang akibat kehidupan yang buruk, sehingga beberapa dari mereka menderita sakit dan kemudian memilih untuk melarikan diri dari tambang. Kondisi hidup kuli tambang yang buruk tersebut pernah dimuat di dalam surat kabar *De locomotief*. Kala itu dikabarkan bahwa dua belas kuli pribumi yang sakit melapor ke kantor polisi untuk mendapatkan izin kembali ke kampungnya. Kuli-kuli tersebut berasal dari Menado sebagai kuli kontrak bersama dengan 105 orang lainnya. Kedua belas kuli pribumi tersebut mengalami kehidupan yang buruk. Mereka tidak memiliki pakaian yang layak. Kuli-kuli tersebut juga mengatakan bahwa dari 105 kuli kontrak yang ada, sekitar 60 kuli telah meninggal dunia di lokasi tambang (*De Locomotief: Samarangsch Handels- En Advertentie-Blad*, 1898).

Pada tahun 1901, beberapa perusahaan yang bekerja di wilayah Residen Menado mengeluhkan perilaku-perilaku buruk para pekerja akibat maraknya desersi dan pencurian. Investigasi yang dilakukan oleh Hoetink menunjukkan bahwa hal tersebut seringkali terjadi karena perusahaan pertambangan menerapkan sistem denda yang tinggi, sehingga menyebabkan para kuli kontrak menerima hukuman pukulan bahkan hanya untuk pelanggaran ringan. Lebih jauh lagi tingkat kematian juga sangat tinggi dan upah bagi

para kuli terlalu rendah. Faktor-faktor tersebut menyebabkan maraknya desersi di antara para kuli (*Koloniaal Verslag* 1902: 291-292).

Awal abad ke-20 memang menjadi masa-masa yang dinamis bagi kaum buruh. Pada masa itu, buruh mulai aktif berorganisasi guna menyerukan perbaikan kondisi dan kemakmuran kelompoknya. Beberapa organisasi buruh bahkan mulai berani melakukan aksi demonstrasi dan mogok kerja untuk menyuarakan aspirasi mereka. Kian kerasnya pergerakan kaum buruh tersebut juga tak bisa dilepaskan dari makin menguatnya suara kelompok liberal di Hindia Belanda. Oleh karena itu, guna meminimalisasi konflik dan mengatur kepentingan antara kaum buruh dengan pemilik modal, Gubernur Hindia Belanda kemudian secara definitif membentuk Inspektorat Tenaga Kerja (*Arbeidsinspectie*) pada 13 Juni 1908. Lembaga tersebut berada di bawah Departemen Kehakiman sesuai keputusan kerajaan Belanda. Adapaun tugas Inspektorat Tenaga Kerja adalah mengawasi relasi hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja dalam ordonansi kuli di wilayah peraturan tersebut berlaku dan mengawasi perekrutan pekerja kontrak di Hindia Belanda (*Staatsblad Tahun 1908 No. 400*: 102). Pada perkembangannya, dibentuklah Komisi Perburuhan di Batavia (1919) yang nantinya berubah menjadi Kantor Perburuhan (*Kantoor van Arbeid*) pada 30 Desember 1921 (Ingleson, 2015: 45).

### **Produksi Emas hingga Likuidasi Perusahaan Pertambangan**

Kegiatan penambangan emas di Paleleh telah menghasilkan produk emas yang sebagian besar dikirim ke Eropa untuk memenuhi permintaan pasar internasional. Pada tahun 1897, perusahaan tambang emas (Buol) menghasilkan 1.400 pc. 85 ton bijih dari Paleleh. Jumlah tersebut dijual melalui pabrik dan mampu menghasilkan keuntungan

pendapatan bersih sejumlah f 20.000 (*Soerabaijasch Handelsblad*, 1897: 1). Pada 18 Juli 1899 terjadi pengiriman 50 ton bijih dengan kandungan rata-rata 6 ½ ons emas dan 15 ons perak (*De Locomotief: Samarangsch handels- en advertentie-blad*, 1899: 3). Sebuah telegram dari Makassar juga mengabarkan bahwa pada Desember 1899 sebuah kapal ss. *Speelm* telah memuat 30 ton bijih dengan kandungan 5½ ons per ton dari Paleleh. Jumlah yang sama juga siap untuk pengiriman selanjutnya. Tetapi, proses pengiriman yang kedua tersebut sempat terhambat dan baru berhasil diangkut dengan kapal sepuluh hari kemudian (*Bataviaasch Nieuwsblad*, 1899: 2).

Pada 1900, *Nederlandsch-Indische Mijnbouw-Maatschappij* yang menguasai kegiatan penambangan di Paleleh tercatat mampu menghasilkan 351 kilogram emas dan 2.292 kilogram perak (*Koloniaal Verslag* 1901: 129-130). Selanjutnya, pada tahun 1902, terjadi pengiriman ke Eropa sebanyak 891 emas batangan dan 6.059 kantong yang masing-masing mengandung 116.419 dan 55.256 gram emas. Pada bulan November 1902, operator mesin dengan kapasitas 150 ton per jam telah dioperasikan. Guna meningkatkan jumlah produksi, *Nederlandsch-Indische Mijningsmaatschappij* juga membangun mesin kedua dan jalan trem di tahun yang sama (*Koloniaal Verslag* 1903: 296-298).

Sementara itu, pada Juni 1905, produksi gabungan penambang di Paleleh tercatat mampu menyuplai sebesar 199.966 kilogram emas dan 62.191 kilogram perak (*Koloniaal Verslag* 1906: 271-272). Menurut telegram yang diterima dari kepala administratif kantor di Paleleh, suplai tersebut mendatangkan keuntungan sebesar f 25.000 (*Het Nieuws van Den Dag Voor Nederlandsch-Indië*, 1905: 1). Hasil produksi kemudian mulai mengalami fluktuasi saat memasuki tahun 1910an dan terus mengalami penurunan hingga tahun 1930. Agar lebih jelas, berikut rinciannya.

**Tabel 2. Hasil Produksi Konsesi Pertambangan di Paleleh dalam Kurun Waktu 1914-1930**

Tahun	Jumlah Hasil (kg)	
	Emas	Perak
1914	477.560	577.80
1917	381.8	338.1
1918	217.999	66.559
1919	219.086	206.370
1920	245.526	
1921	246.028	161.428
1923	241.197	226.389
1924	286.731	310.643
1925	232,863	218,451
1926	187.998	171.141
1927	176.284	142.255
1928	166.009	118.600
1929	124.453	78.159
1930	96.533	96.533

(Sumber: *Koloniaal Verslag* 1915: 262; 1917: 274; 1918: 268; 1919: 306; 1921: 288; 1922: 328; 1923: 232; 1924: 231; 1925: 246; 1926: 260; 1927; 1928: 252; 1929: 249; 1930: 231).

Fluktuasi dan penurunan jumlah hasil produksi yang dialami perusahaan pertambangan di Paleleh dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari teknis produksi, cuaca, dan ketersediaan cadangan bijih di tambang yang terus menurun hingga malaise ekonomi tahun 1930. Krisis yang dialami oleh perusahaan tambang di Paleleh kemudian menyebabkan beredarnya berita-berita tentang rencana penutupan atau likuidasi di dalam surat kabar pada masa itu.

Berita tentang likuidasi perusahaan *Mijnbouw Maatschappij Paleleh* dimuat dalam harian *Soer. Hbld*. Surat kabar tersebut memberitakan bahwa *Mijnbouw Maatschappij Paleleh* telah dilikuidasi sejak Januari 1927. Proses likuidasi dilakukan secara bertahap karena masih terdapat sedikit bahan baku (material) yang bisa diolah (*Het Nieuws van Den Dag Voor Nederlandsch-Indië*, 1927: 2). Perusahaan kemudian benar-benar

ditutup pada bulan April 1929 (*Bataviaasch Nieuwsblad*, 1928).

Likuidasi atau penutupan perusahaan pertambangan mengakibatkan banyak penduduk meninggalkan daerah tambang emas. Sementara itu, penduduk yang memilih tetap tinggal di Paleleh mulai disibukkan dengan pekerjaan mengolah lahan pertanian dan mencari hasil hutan. Penduduk juga menanam pohon kelapa untuk produksi komoditas kopra. Aktivitas perdagangan tersebut mengalami pertumbuhan dengan dukungan letak geografis Paleleh yang strategis sebagai daerah transit pusat perdagangan dan tersedianya tanah yang subur untuk menghasilkan komoditas perdagangan yang menarik para pendatang dan pedagang untuk menetap dan membangun pemukiman di Paleleh. Sebagai contoh, orang-orang Tionghoa mulai tertarik membuat pemukiman di Lintidu. Selain berdagang, mereka juga secara gelap membeli emas dari penduduk. Orang-orang Arab khususnya Said Abdullah, Al-Hamri, dan Al-Idrus memiliki peran dalam mengembangkan perkebunan kelapa di Paleleh sampai Lintidu. Selain orang Tionghoa dan Arab, terdapat juga orang-orang Gorontalo yang melakukan usaha perkebunan kelapa untuk pembuatan kopra. Sementara itu, orang-orang Bugis memiliki peran besar dalam mengembangkan usaha perdagangan dengan cara memanfaatkan jaringan pelayaran dan perdagangan. Hal ini secara otomatis memberi potensi besar bagi kemajuan Paleleh dan umumnya bagi daerah Buol.

## PENUTUP

Pada abad ke-19, Paleleh merupakan salah satu wilayah di Buol, *Afdeeling* Gorontalo. Kekuasaan pemerintah Hindia Belanda pada awalnya kurang tertarik dengan Buol karena dianggap sebagai kerajaan kecil. Setelah ditemukannya kandungan emas yang melimpah dan melalui penyelidikan para investor yang memberi pemahaman tentang

keuntungan yang lebih besar dari komoditas emas, pemerintah Hindia Belanda mulai menancapkan kekuasaan dan kebijakannya di Buol. Pertama-tama, pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui Residen Menado menekan *Madika* Buol untuk menandatangani kontrak atau perjanjian guna mendukung kegiatan penambangan di sana. Pada tahun 1896, Residen Menado mengangkat Dr. H. Siber sebagai *gezaghebber* (perwakilan pemerintahan Hindia Belanda) di Buol yang berkedudukan di Paleleh. Setelah berhasil membatasi pengaruh dan kekuasaan *madika* di Buol, pemerintah Hindia Belanda kemudian mendominasi pemerintahan tradisional Buol. Pemerintah kolonial juga mulai memonopoli hasil produksi emas sebagai produk utama di Paleleh, termasuk mengatur pajak hasil tambang emas melalui konsesi pertambangan dengan melibatkan perusahaan swasta. Ada beberapa perusahaan tambang swasta yang muncul di Paleleh (Buol), seperti *Nederlandsch-Indische Mijnbouw Maatschappij*, *Goud Syndicaat Bwool*, *Mijnbouw-Maatschappij Bwool*, dan *Mijnbouw Maatschappij Paleleh*. Semua perusahaan yang ada di wilayah Paleleh tersebut, umumnya menggunakan cara "tambang dalam" saat menggali.

Mengalirnya investasi perusahaan tambang emas di Paleleh juga membuat daerah tersebut mengalami perkembangan. Sejak ditemukannya sumber daya mineral penting berupa emas, Paleleh menjadi pusat administratif pemerintahan Hindia Belanda yang pertama kali didirikan di Buol. Selain itu, berdirinya beberapa pertambangan di Paleleh telah mendorong pembangunan infrastruktur dan jalur kereta api yang memudahkan aktivitas ekonomi-politik di sana. Masuknya para pendatang sebagai pekerja dan kuli tambang juga telah memberi arti pada perkembangan keragaman sosial masyarakat di Paleleh. Pada umumnya, posisi-posisi pekerja tingkat atas seperti insinyur dan direktur dijabat oleh orang-orang Eropa

yang didatangkan ke Paleleh. Sementara itu, para kuli atau buruh tambang umumnya adalah laki-laki muda yang kuat secara fisik dan awalnya tidak membawa serta keluarga di tempat kerjanya. Secara sosial-budaya, kuli di perusahaan tambang berasal dari berbagai subkelompok, subbudaya, dan kelompok-kelompok etnik lainnya. Menurut manajemen perusahaan, kuli juga dapat dibedakan menjadi dua, yakni kuli kontrak dan kuli bebas.

Sayangnya, produksi perusahaan tambang emas di Paleleh dan sekitarnya mulai menurun sejak memasuki awal abad ke-20. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan penurunan tersebut di antaranya teknis produksi, cuaca, ketersediaan cadangan bijih di tambang yang terus menurun hingga malaise ekonomi tahun 1930. Krisis yang dialami oleh perusahaan tambang di Paleleh tersebut pada akhirnya menyebabkan perusahaan ditutup atau dilikuidasi.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya, para tokoh masyarakat Paleleh dan Lintidu atas waktu dan kesempatan yang diberikan selama melakukan penelitian. Terima kasih juga kepada Jurnal Pangadereng yang telah mempublikasikan penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. (1985). *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Algemeen Handelsblad (25 Oktober 1905). *Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)*. *Ambon*: No. 1532.
- \_\_\_\_\_. *Besluit* Nomor 26 Tahun 1898.
- \_\_\_\_\_. *Inventaris Arsip Gorontalo 1810-1865*: No. 1/6.
- \_\_\_\_\_. *Koloniaal Verslag over het jaar* 1901, 1902, 1903, 1906, 1915, 1917, 1918, 1919, 1921, 1922, 1923, 1924,

- 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930.
- \_\_\_\_\_. *Staatsblad* Tahun 1908 No. 400.
- Bataviaasch Nieuwsblad* (14 Mei 1898, 9 Agustus 1898, 4 Juli 1899, 14 November 1928).
- De Java Bode* (5 Agustus 1897).
- De Locomotief* (26 Juli 1898).
- De Locomotief: Samarangsche Handels- En Advertentie-Blad* (6 Februari 1896, 6 Desember 1898, 29 Juli 1899).
- Furnivall, J. (2009). *Hindia Belanda: Studi tentang Ekonomi Majemuk*. Freedom Institute.
- Hasanuddin & Basri, A. (2012). *Gorontalo Dalam Dinamika Sejarah Masa Kolonial*. Yogyakarta: Ombak.
- Hamid, R. A (67 tahun). 2020. Tokoh Masyarakat Lintidu. *Wawancara*, Buol, 29-30 Maret 2020.
- Het Nieuws van Den Dag Voor Nederlandsch-Indië* (28 Juni 1905, 4 Januari 1927).
- Het nieuws van den dag: kleine courant* (6 November 1905).
- Ingleson, J. (2015). *Buruh, Serikat, dan Politik: Indonesia pada 1920an-1930an*. Jakarta: Margin Kiri.
- Juwono, H. dan Hutagalung, Y. (2005). *Limo Lo Pohalaa*. Yogyakarta: Ombak.
- Kartodirdjo, S. (1982). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Kawandaud, T. (1949). *Tambo dan Sejarah Buol*. Gorontalo: Drukkerij Annaser.
- KITLV 001033557, 001033660
- Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Benteng.
- Lapian, A. B. (2011). *Orang Laut-Bajak Laut-Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Nadjamuddin, L. (12 Oktober 2015). History of Buol: Study on The Border Territory and Exploitation of Mine. *1st UPI International Conference on Sociology Education*.

- Pakude, H (58 tahun). 2020. Tokoh Masyarakat Lintidu. *Wawancara*, Buol, 29-30 Maret 2020.
- Paulus, J. (1917). *Encyclopaedie van Nederlandsch Indië, eerste deel*. 's Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Regering Almanak Voor Nederlandsch-Indie*. (1907). Batavia: Landsdrukkerij.
- Samad, A. R. (2000). *Sejarah Buol (I)*. Palu: Perum PNRI.
- Soerabaijasch Handelsblad* (19 September 1894, 8 April 1897, 1 Oktober 1897).
- Turungku, I (72 tahun). 2014. Raja Buol, Ketua Dewan Adat Buol. *Wawancara*, Buol, 1 Maret 2014.
- Stibbe, D. G. et. al. (1919). *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*.
- Witkamp, H. P. T. (1898). *Handleiding: Kaart Van Noord-Celebes*. J.H. De Buss.